

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan yang memungkinkan penarikan kesimpulan sebagai berikut:

1) Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. RPTRA dirancang untuk melayani berbagai kelompok sasaran, termasuk anak-anak, remaja, perempuan, keluarga, dan lansia, dengan tujuan menyediakan ruang publik yang aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kelompok sasaran dapat mengakses dan merasakan manfaat RPTRA secara optimal karena berbagai keterbatasan dalam program, fasilitas, dan efektivitas pengelolaan. Organisasi pelaksana RPTRA seharusnya berperan dalam memastikan bahwa kegiatan dan layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian, seperti kurangnya

keterlibatan aktif dalam perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat, minimnya tenaga pengelola yang memiliki kapasitas memadai, serta lemahnya pengawasan terhadap efektivitas program yang dijalankan. Hambatan lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya koordinasi antarstakeholder, keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan fasilitas, serta rendahnya sosialisasi yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan RPTRA secara maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan kapasitas pengelola RPTRA melalui pelatihan, pengembangan program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan RPTRA Sungai Bambu dapat lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi seluruh kelompok sasaran dan berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

2) Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu, Kota Administrasi Jakarta Utara, masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. RPTRA dirancang sebagai ruang publik yang ramah anak serta mendukung kesejahteraan kelompok sasaran utama, yaitu anak-anak, remaja, perempuan, keluarga, dan lansia, melalui berbagai program edukasi, kesehatan,

sosial, dan pemberdayaan. Namun, dalam implementasinya, program yang diselenggarakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran, yang disebabkan oleh keterbatasan dalam perencanaan kegiatan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program, serta belum meratanya akses terhadap fasilitas yang tersedia. Beberapa program yang berjalan tidak selalu relevan atau kurang diminati oleh kelompok sasaran karena kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung juga menjadi kendala dalam memastikan setiap kelompok sasaran mendapatkan manfaat maksimal dari keberadaan RPTRA. Untuk meningkatkan kesesuaian ini, perlu dilakukan penyesuaian program berbasis kebutuhan nyata masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk warga setempat, komunitas sosial, dan organisasi pemerhati anak serta perempuan. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas pengelola dalam merancang dan menjalankan program yang lebih inklusif serta penguatan sistem evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya perbaikan tersebut, RPTRA Sungai Bambu diharapkan dapat berfungsi secara lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan seluruh kelompok sasaran dan mewujudkan lingkungan yang lebih aman, edukatif, serta memberdayakan masyarakat sekitar.

3) Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan Organisasi Pelaksana di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara

Kesesuaian antara program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan organisasi pelaksana di Kelurahan Sungai Bambu, Kota Administrasi Jakarta Utara, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan program RPTRA, organisasi pelaksana seharusnya memastikan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan tujuan utama RPTRA, yaitu menciptakan ruang publik yang ramah anak, aman, dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan kapasitas serta efektivitas organisasi pelaksana dalam mengelolanya. Keterbatasan dalam sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi dalam pendidikan anak, pemberdayaan perempuan, serta pengelolaan kegiatan sosial, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan program kurang optimal. Selain itu, lemahnya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi sosial, menyebabkan kurangnya inovasi dalam program serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan. Keterbatasan anggaran serta kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif juga berdampak pada rendahnya kualitas pelaksanaan program, sehingga tidak semua kelompok sasaran mendapatkan manfaat yang maksimal dari keberadaan RPTRA.

4) Kendala pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara

Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu, Kota Administrasi Jakarta Utara, masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi manfaatnya bagi masyarakat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesesuaian antara program yang diselenggarakan dengan kebutuhan kelompok sasaran, seperti anak-anak, remaja, perempuan, dan lansia, akibat minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam organisasi pelaksana RPTRA, terutama dalam hal kapasitas dan kompetensi pengelolaan program berbasis pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, juga menjadi hambatan yang signifikan. Dari segi fasilitas, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi sarana dan prasarana dengan standar yang ditetapkan, termasuk kurangnya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang menyebabkan beberapa area RPTRA tidak dapat digunakan secara optimal. Faktor lain yang turut menghambat efektivitas program adalah lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga berbagai program berjalan tanpa adanya mekanisme penilaian yang jelas untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama, yang berdampak pada rendahnya inovasi dalam pengembangan program serta kurangnya dukungan operasional bagi keberlanjutan kegiatan RPTRA. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi sosial, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program juga memperparah

kondisi ini, sehingga banyak inisiatif yang tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala ini, perlu adanya langkah strategis seperti peningkatan kapasitas pengelola RPTRA, penyesuaian program berbasis kebutuhan nyata masyarakat, perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi, serta penguatan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan RPTRA secara lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan program, sebagai berikut:

- 1) Terkait tingginya kasus kekerasan yang masih terjadi terhadap kelompok sasaran dalam Program RPTRA Sungai Bambu, organisasi pelaksana mengadakan pusat layanan pengaduan yang dapat diakses masyarakat, program edukasi pencegahan kekerasan dengan mengadakan pelatihan rutin bagi anak-anak, remaja, dan orang tua tentang pencegahan kekerasan dan cara melaporkan tindakan kekerasan, serta pelatihan pengelola RPTRA dengan melatih pengelola RPTRA agar mampu memberikan pertolongan pertama psikologis dan pendampingan awal bagi korban kekerasan.
- 2) Terkait belum terlaksananya layanan kegiatan BKB-PAUD akibat keterbatasan tenaga pengajar yang sesuai, maka segera mengadakan pelatihan khusus untuk

calon pengajar, baik dari kalangan tenaga pendidik lokal maupun relawan yang memiliki minat dalam pendidikan anak usia dini. Selain itu, pengelola RPTRA dapat menggali potensi kemitraan dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang memiliki program pelatihan PAUD, serta menjalin kerja sama dengan organisasi terkait untuk menciptakan solusi jangka panjang. Dengan memperkuat kapasitas pengajar melalui pelatihan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, layanan BKB PAUD dapat terlaksana secara efektif dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini di Kelurahan Sungai Bambu.

- 3) Terkait dengan kondisi fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di RPTRA Sungai Bambu, maka segera dilakukan renovasi dan perawatan berkala dengan mengoptimalkan anggaran yang ada di Kelurahan untuk pemeliharaan fasilitas agar tetap layak digunakan, termasuk taman bermain, ruang baca, dan sarana olahraga, Pengawasan dan Evaluasi Infrastruktur dengan mengadakan audit rutin terhadap kondisi sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau penggantian fasilitas serta Pemanfaatan Dana CSR dengan menggalang kerja sama dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kualitas fasilitas RPTRA.
- 4) Terkait dengan ketidaksesuaian efektifitas pengawasan organisasi pelaksana pada Program RPTRA Sungai Bambu maka organisasi pelaksana segera membentuk tim pengawas independen dengan mengadakan tim evaluasi yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk menilai kinerja pengelola RPTRA, Sistem Pelaporan dan Transparansi yang mewajibkan

organisasi pelaksana untuk membuat laporan berkala mengenai kegiatan, penggunaan anggaran, dan pencapaian program, serta Mekanisme Umpan Balik Masyarakat dengan Menyediakan kanal pengaduan dan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan RPTRA sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan.